



SEKOLAH INKLUSI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS: TANGGAPAN TERHADAP TANTANGAN KEDEPANNYA

Jamilah Candra Pratiwi

*Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Pascasarjana UNS
jcandrapratiwi@gmail.com*

ABSTRAK

Sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang layak. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan disekolah reguler. Di sekolah inklusi memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal. Hal tersebut menunjukkan dampak positif sekolah inklusi terhadap anak berkebutuhan khusus dari segi psikologis.

Berbagai masalah yang timbul setelah lebih dari 10 tahun diimplementasikan dalam praktik pendidikan inklusi menunjukkan adanya tantangan yang menghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Salah satu faktornya adalah kompetensi guru yang belum mampu menangani anak berkebutuhan khusus di kelas reguler. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusi bergantung pada kompetensi guru dan kerjasama sekolah dengan pemerintah.

Kata kunci: pendidikan inklusi, tantangan penyelenggaraan sekolah inklusi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan baik formal, informal, dan non formal. Sekolah merupakan contoh dari lembaga pendidikan yang bersifat formal. Dewasa ini, peran sekolah sangat penting. Sekolah tidak hanya sebagai wahana untuk mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberi bekal keterampilan untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Di sekolah anak juga dibimbing untuk bersosialisasi dengan orang lain. Keberadaan sekolah tidak saja penting bagi anak normal, melainkan bermanfaat pula untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dan kekurangan ketika harus berinteraksi dengan orang lain.

Anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan perlu dikasihani. Hal inilah yang menjadikan anak berkebutuhan khusus sering dikucilkan atau termaginalkan dari lingkungan sekitar. Anak-anak berkebutuhan khusus sering menerima perlakuan yang diskriminatif dari orang lain. Bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Beberapa sekolah reguler tidak mau menerima mereka sebagai siswa. Alasannya guru di sekolah tersebut tidak

memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Terkadang sekolah khusus letaknya jauh dari rumah mereka, sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disediakan berbagai layanan pendidikan atau sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, baik menyangkut system pembelajaran, fasilitas yang mendukung, maupun peran guru yang sangat penting untuk memberikan motivasi dan arahan yang bersifat membangun. Sekolah yang dianggap tepat untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistemik (Ilahi, 2013: 25).

Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan sekolah inklusi menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sekolah. Tantangan yang bersal dari dalam salah satunya adalah ketidaksiapan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi.

METODE

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, menurut Nazir (2003: 111)



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



mengemukakan bahwa “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”Peneliti melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan.

Sumber-sumber kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari: buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi). Sehingga dalam penelitian ini meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia, dilatarbelakangi oleh hak anak untuk memperoleh pendidikan. Setiap makhluk mempunyai kebutuhan. Sebagai makhluk Tuhan yang dianggap mempunyai derajat tertinggi di antara makhluk lainnya, manusia mempunyai kebutuhan yang paling banyak dan kompleks. Kebutuhan manusia secara umum mencakup kebutuhan fisik atau kesehatan, kebutuhan sosial emosional, dan kebutuhan pendidikan (Wardani, 2011: 1.34). Tidak berbeda dengan orang-orang normal, anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kebutuhan yang sama.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya. Dalam pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam BAB IV Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan isi pada pasal 5, dapat disimpulkan bahwa anak luar biasa mempunyai hak yang menjamin kelangsungan pendidikan mereka, bahkan anak berkebutuhan khusus berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pada ayat 2, 3, dan 4 menegaskan bahwa anak luar biasa

berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Anak luar biasa disini bukan saja mereka yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, dan intelektual saja, melainkan mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Hak untuk memperoleh pendidikan bukan hanya dilindungi dalam Undang-Undang dalam negeri saja, melainkan juga tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Kemanusiaan 1948 (*The 1948 Universal Declaration of Human Right*), kemudian diperbarui pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Tahun 1990 (*The 1990 World Conference on Education for All*), yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa hak tersebut adalah untuk semua, terlepas dari perbedaan yang dimiliki oleh individu. Pada tanggal 7 – 10 Juni 1994, diselenggarakan Konferensi Dunia tentang Pendidikan bagi Anak Luar Biasa di Salamanca, Spanyol. Dalam konferensi tersebut dimantapkan komitmen tentang *Education for All (EFA)*, dan dikeluarkan Kerangka Kerja untuk Pendidikan Anak Luar Biasa yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi setiap negara dalam penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa.

Menanggapi uraian di atas, seorang guru wajib memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengaktualisasikan diri melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak terbatas di sekolah luar biasa, tetapi juga pendidikan yang terintegrasi, yang memungkinkan anak luar biasa belajar bersama dengan anak normal. Sistem pendidikan seperti ini disebut dengan pendidikan inklusi. Di Indonesia, implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Anak Berkebutuhan Khusus dan Sekolah Inklusi

Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah regular (Tarmasyah,



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



2007; Marthan, 2007; Loiacono dan Valenti, 2010). Kehadiran sekolah inklusi merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus pula. Dengan adanya sekolah inklusi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler layaknya anak normal.

Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk mengartikan Anak Luar Biasa (ALB) yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain (Mulyono, 1999 dan Delfi, 2006).

Keuntungan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Terlepas dari kenyataan bahwa model inklusi merupakan sekolah yang konsisten dengan gagasan keadilan sosial yang mendukung prinsip normalitas, ada banyak keuntungan yang diperoleh dari sekolah inklusi ini. Sekolah inklusi dianggap dapat memberi berbagai manfaat baik masyarakat umum maupun bagi anak luar biasa sendiri. Masyarakat akan mulai mau menerima keberadaan anak luar biasa. Selain itu di sekolah inklusi juga memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal (IG.A.K. Wardani, 2011:1.36).

Hal tersebut berdampak pada psikologis anak berkebutuhan khusus, yaitu memberikan kesempatan bagi perkembangan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus (*self esteem*). *Self esteem* merupakan bagian dari *self concept* atau konsep diri. *Self esteem* adalah perasaan seseorang tentang ketidaksesuaian antara dirinya dan ingin menjadi apa nantinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *self esteem* adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri baik itu kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Anak yang memiliki *self esteem* yang tinggi umumnya merasa dirinya berharga, sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri, tetapi tetap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, anak yang memiliki *self esteem* yang rendah, merasa dirinya kurang berharga dan kekurangan yang ia sandang mempengaruhi bagaimana ia

memandang dirinya sendiri (Schmidt dan Cagran, 2008, Wilson, dkk, 2011, dan Trampler 2012).

Self esteem dapat dibangun dengan cara rasa penerimaan orang-orang di sekitar terhadap keberadaan dirinya. Anak yang diterima oleh orang-orang di sekitarnya memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan merasa lebih dihormati, sehingga mampu mengembangkan potensi diriserta mencapai keberhasilan berdasarkan kekuatannya (Wilson, Ellerbee, dan Christian, 2011, Watkins 2005).

Banyak penelitian yang membahas manfaat yang diperoleh anak berkebutuhan khusus dari sekolah reguler. Loiacono dan Valenti (2010) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler memiliki kompetensi sosial yang lebih baik. Irvine dan Lupart (2006) juga setuju bahwa menempatkan anak dengan kebutuhan khusus juga baik bagi kemampuan sosialnya. Interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan diri mereka.

Kompetensi sosial dikembangkan dengan cara anak berkebutuhan khusus belajar berinteraksi dengan orang yang normal. Peserta didik ditunjukkan situasi hidup yang nyata di dalam kelas (Wilson, Ellerbee, dan Christian, 2011). Interaksi sosial mengajarkan peserta didik untuk meniru strategi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, memperoleh kecakapan hidup yang lebih baik, dan mengurangi perilaku yang meledak-ledak (Irvine dan Lupart, 2006).

Tantangan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Disamping manfaat yang diperoleh dari sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, ada tantangan yang perlu dihadapi dari penyelenggaraan sekolah inklusi secara penuh. Tantangan tersebut berasal dari dalam maupun dari luar sekolah.

Perasaan guru akan kurangnya kompetensi

Ward (1987) berpendapat bahwa penolakan dari guru dan lemahnya dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang anak dengan kebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan yang tidak memberikan bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menjadi penyebab guru di sekolah reguler menolak



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



adanya kebijakan sekolah inklusi. Guru menganggap diri mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengajar siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, namun kebijakan telah menuntut mereka untuk menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan guru dan perlakuan guru (Pavri & Luftig; Cook, 2000, dalam Pujaningsih, 2011). Sikap yang ditunjukkan guru tersebut akan mempengaruhi penerimaan anak berkebutuhan khusus oleh teman-temannya (Paris, 2000). Dengan demikian komitmen guru di sekolah inklusi menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan atau kegagalan program inklusif.

Keterbatasan sarana dan prasarana

Penyelenggaraan sekolah inklusi memang membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak, karena sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku braille untuk anak tuna netra, dan sebagainya (Yusraini, 2013). Keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah faktor biaya.

Perlunya kolaborasi

Banyak guru atau dokter khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana guru berkolaborasi dengan yang lain? Guru dikenal karena memiliki kemampuan untuk mengontrol kelas mereka sendiri. Kehadiran atau keberadaan guru lain di dalam kelas merupakan masalah baru bagi beberapa guru (Chandler, 2000). Beberapa guru tidak mau menghabiskan waktu untuk berkolaborasi dalam mengembangkan program inklusi, ketidakcocokan antara guru kelas dan guru pendamping berdampak pada pelayanan yang diberikan.

Beban administrasi dan modifikasi kurikulum

Seorang guru hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Pola pembelajarannya harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, biasa disebut

dengan *Individualized Educational Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI), perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidik harus memiliki kemampuan khusus. Pada kenyataannya hasil monitoring sekolah inklusi yang dilakukan oleh Direktorat PSLB menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah inklusi mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non akademik (Sutji Harijanto, 2011). Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

Selain itu, guru juga masih terbebani dengan adanya tuntutan administrasi dari sekolah. Tuntutan administrasi sekolah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus antara lain, beban pengumpulan data yang diperlukan untuk prosedur penilaian fungsional, administrasi untuk pendanaan, laporan untuk guru khusus, dan laporan pelayanan yang diberikan (Folin, 1997). Beban yang dirasakan itulah yang menyebabkan ketidaksanggupan guru untuk memasukkan siswa berkebutuhan khusus di kelas mereka.

Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Orang tua dari anak berkebutuhan khusus memiliki peranan yang besar, baik dalam pengambilan keputusan untuk pendidikan sampai pada dukungan kepada anak. Dukungan orang tua adalah keterlibatan orang tua dalam berbagai bentuk termasuk mengasuh di dalam rumah, menciptakan situasi yang aman dan stabil, dan model pengasuhan yang tepat. Seorang anak berkebutuhan khusus dapat mencapai potensinya secara maksimal apabila mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Dukungan dari ibu dapat memunculkan perasaan berharga pada anak, sementara dukungan dari ayah dapat mengembangkan kompetensi anak (Danielsen, 2009).

Selain orang tua tokoh penting yang mempengaruhi perkembangan anak berkebutuhan khusus adalah masyarakat. Penerimaan orang tua dan masyarakat terhadap kondisi anak akan mempengaruhi sikap mereka kepada anak. Lingkungan yang mampu menerima ketunaan anaknya, akan berusaha mencari jalan untuk mengurangi pengaruh ketunaan tersebut dan mendorong



pembelajaran anak semaksimal mungkin. Sebaliknya lingkungan yang belum bisa menerima kondisi anak akan cenderung merasa malu dan kurang terbuka terhadap perkembangan anak.

Pada kenyataannya masih banyak orang tua yang enggan memasukkan anak dengan kebutuhan khusus ke sekolah regular dengan alasan khawatir akan mendapat penolakan atau diskriminasi. Begitu juga dengan masyarakat yang masih menunjukkan sikap kurang peduli dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi.

Tanggapan terhadap tantangan yang ada Mengembangkan model pendidikan guru untuk mendukung pendidikan inklusif

Untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang pendidikan luar biasa, perlu adanya pengembangan model pendidikan guru. Strawderman & Lindsey 1995 (dalam Pujaningsih, 2011) menyatakan bahwa perubahan desain pendidikan guru dapat dilakukan dengan cara menambah matakuliah baru atau pengalaman lapangan baru. Dampak dari strategi ini diteliti oleh O'Shea & Satter 1999 (dalam Pujaningsih, 2011) pada mata kuliah yang diikuti oleh calon guru (regular dan khusus) melalui berbagai aktivitas kolaboratif antar mahasiswa, menjadikan mahasiswa lebih siap untuk membuat perencanaan pembelajaran, menggunakan berbagai pembelajaran, melakukan modifikasi, dan cara membuat administrasi kelas.

M Gut, *et al* 2003 (dalam Pujaningsih, 2011) menegaskan bahwa dalam matakuliah di atas mengarahkan suasana pembelajaran yang membuka peluang berbagai pendapat untuk menentukan keputusan, komunikasi terbuka, dan kolaborasi antara guru regular dan guru khusus. Dengan demikian kompetensi dan pengetahuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus akan meningkat. Guru tidak lagi terbebani dengan modifikasi kurikulum, administrasi kelas, dan kolaborasi dengan pihak lain.

Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat diperlukan peran serta sekolah dan pejabat daerah terkait. Misalnya sekolah berkerjasama dengan tim penggerak PKK kelurahan untuk mensosialisasikan keberadaan anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Kerjasama ini diharapkan dapat

menumbuhkan kesadaran masyarakat hingga lapisan terbawah. Selain itu dibutuhkan usaha dari pemerintah pusat untuk mempromosikan keberadaan sekolah inklusi dan dampak positif yang akan diperoleh. Selama 10 tahun penyelenggaraan pendidikan inklusi, pemerintah baru terlihat memberikan bantuan dibidang keuangan, namun belum mempromosikannya, seperti pada saat Sekolah Kejuaran.

Meningkatkan sarana dan prasarana

Keterbatasan biaya yang dimiliki sekolah berdampak pada minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan berkaitan dengan fasilitas untuk sekolah inklusi (Konza, 2008). Dalam hal ini kepala sekolah bisa membuat proposal pengajuan dana kepada pemerintah yang terkait. Lancarnya komunikasi antara sekolah dan pemerintah diharapkan berdampak positif bagi penyelenggaraan sekolah inklusi. Dengan demikian anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang maksimal

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan baik bagi anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah regular.
2. Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya seperti memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah regular.
3. Manfaat yang diperoleh dari inklusi salah satunya adalah Sekolah inklusi dipandang paling efektif untuk melawan sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang mau menerima kedatangan anak luar biasa, dan mencapai pendidikan untuk semua. Di dalam kelas inklusi anak berkebutuhan khusus memperoleh perlakuan yang sama seperti anak normal. Sikap terbuka dari teman-teman sebaya dan guru di sekolah inklusi mempengaruhi *self esteem* anak. Anak akan memiliki *self esteem* yang tinggi,



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki tetapi tetap sadar akan kekurangan pada dirinya.

4. Mengembangkan model pendidikan bagi guru merupakan salah satu alternative untuk mengurangi tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Dengan cara memberikan materi atau pelatihan tentang anak berkebutuhan khusus. Guru merupakan tokoh sentral dalam melakukan perubahan, sehingga dibutuhkan komitmen, pengetahuan, dan dukungan dari guru kelas regular untuk meningkatkan kesadarannya dalam mengembangkan sekolah inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Avrimidis, E., Bayliss, P., & Burdon, R. (2000). A survey into mainstream teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in one local education authority. *Educational Psychology*, 20(2), pp191-212.
- Bandi Delfi. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu pengantar Dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: Relika Aditama.
- Center, Y., & Ward, J. (1987). Teachers' attitudes towards the integration of disable children into regular schools. *The Exceptional Child*, 34, pp 41-56.
- Chandler, L. K. (2000). A training and consultation model to reduce resistance and increase educator knowledge and skill in addressing challenging behaviours. *Special Education Perspectives*, 9(1), pp3- 13.
- Forlin, C., Jobling, A., & Carrol, A. (2001). Preservice teachers' discomfort levels toward people with disabilities. *The Journal of International Special Needs Education*, 4, pp32-38.
- IG. A.K. Wardani. 2009. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Konza, D. (2008) *Review of Special Educational Services*. Engadine, NSW: St John Bosco College.
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009
- Pujaningsih. 2011. *Redesain Pendidikan Guru Untuk Mendukung Pendidikan Inklusif*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Osterhom, K., Nash, W., Kritsonis,. 2007. *Effect of Labelling Students "Learning Disabled": Emergaent Themes in the Research Literature 1970 Through 2000*. Focus Colleges, Universiies and Schools. Volume 1 Number 1
- Schmidt, M., Cagran, B., 2008. *Self-Concept Of Students In Inclusive Settings*. International Journal Of Special Education. Vol 23 No 1
- Sutji Harijanto (2011) The Indonesian Government Policy on Special Education in Global Perspective. Makalah disampaikan dalam International seminar on Special Education pada 19 Maret 2011.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Watkins, Deborah. 2005. *Maximing Learning for Students With Special Needs*. Kappa Delta Pi Records
- Wilson, C. Ellerbee, K., Christian. 2011. *Best Practice Of Inclusion at The Lementary Level*. ERIC
- Yusraini. 2013. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Inklusif*. Jurnal Media Akademika. Vol 28 No 1